

## **BAB II**

### **TURKI PASCA REVOLUSI DAN PERBANDINGAN POLITIK LUAR NEGERI KEMAL PASHA DAN ERDOGAN**

Turki mengalami perubahan yang luar biasa setelah terjadinya revolusi yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha, perubahan tersebut terjadi karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mustafa Kemal Pasha sangat sekuler dan mengambil kebijakan yang menjauhkan diri dari islam. Perubahan kebijakan tidak hanya terjadi pada kebijakan-kebijakan dalam negeri tetapi juga terjadi dalam kebijakan luar negeri. Dalam bab II ini, akan dibahas mengenai perkembangan Turki pasca revolusi dan politik luar negeri Turki era Mustafa Kemal Pasha serta perbandingannya dengan era Erdogan.

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Turki Pasca Revolusi**

##### **1. Kebijakan Sekulerisme oleh Mustafa Kemal Pasha**

Dihapusnya sistem Khalifah pada tahun 1923 di Turki, hal tersebut menjadi babak baru dalam perkembangan sekularisme secara besar-besaran yang terjadi di Turki. Mustafa Kemal melakukan reformasi besar-besaran dengan menghilangkan Islam dan berkiblat ke zaman pencerahan Barat. Pada kurun waktu 1923 sampai tahun 1950 merupakan masa revolusi Turki dari islam ke Sekuler (Freely, 2002, hal. 378). Pada 20 April 1924, Majelis Nasional Agung mengeluarkan undang-undang anti-teokratis. Perubahan selanjutnya yang dilakukan oleh Mustafa Kemal adalah berusaha mencabut Islam ke akarnya sehingga umat Islam dan agama lainnya sangat dibatasi dalam menjalankan ibadah. Reformasi Mustafa Kemal dalam bidang sosial budaya di Republik Turki misalnya, yakni mengeluarkan peraturan tentang tata cara berpakaian pada September dan November 1925.

Para lelaki dilarang menggunakan pakaian keagamaan dan penggunaan topi torbus yang sebelumnya pada masa kekhalifahan Turki Utsmani biasa digunakan. Kaum wanita juga tidak luput dari peraturan pelarangan pemakaian jilbab. Penggunaan pakaian serta topi diwajibkan seperti yang digunakan oleh bangsa Barat baik laki-laki maupun wanitanya. Kemudian kalender Hijriah pun diganti dengan kalender Georganian seperti kalender yang digunakan oleh negara-negara Barat.

Syariat Islam yang pada masa kekhilafahan Turki Utsmani dijadikan sebagai landasan dasar hukum masyarakat Turki diganti dengan undang-undang sipil yang diadopsi dari Hukum Swiss pada 1926. Selain itu, dikeluarkan juga peraturan tentang diwajibkannya penggunaan marga bagi setiap masyarakat Turki, sehingga nama-nama gelar seperti Kamal, Ghazi, Pasha, Bey, Shaikh, Effendi, Hanim haruslah dihapuskan.

Pada 1928, disahkannya oleh Majelis Nasional Agung Turki dalam pengadopsian dan penerapan huruf Latin. Mustafa Kemal kemudian juga memindahkan ibukota yang tadinya di Istanbul dipindahkan ke Ankara. Kantor dan instansi pemerintahan yang berbau Islam pun dibubarkan. Kantor yang dibubarkan oleh Mustafa Kemal yakni kantor Seyhul Islam dan Kementerian Syariat. Sekolah-sekolah agama juga ikut ditutup, semua pelajaran tentang agama baik Islam ataupun Kristen dibatasi.

Satu hal yang dianggap sebagai kemajuan positif dari sekulerisme Mustafa Kemal adalah perempuan diberikan kesempatan untuk ikut dalam pemerintahan. Namun begitu, umat Islam wanita tetap dilarang menggunakan jilbab dan simbol Islam yang lain. Pada Tahun 1932 hal

tersebut disusul dengan pemurnian bahasa Turki dari dominasi unsur-unsur bahasa Arab dan Persia (Freely, 2002, hal. 379).

Pada masa revolusi ini, kebijakan-kebijakan dalam negeri yang dilakukan oleh Mustafa Kemal terdiri dari : Penghapusan kesultanan (1922) yang diiringi dengan pendirian Republik Turki (1923), penghapusan kekhalifahan (1924), penghapusan Seyhul Islam (1924), penghapusan Kementerian Urusan Agama (1924), penghapusan pengadilan Syariah (1924), penghapusan sekolah madrese (1924), pelarangan *tariqa* (kelompok-kelompok persaudaraan agama) (1925), pelarangan fez atau kopiah (1925), pengadopsian kalender Gregorian (1925), pengadopsian Hukum Swiss dalam perundang-undangan sipil (1926), pengadopsian numeral (sistem angka) Eropa (1928), pengadopsian aksara Latin (1928), penghapusan pasal II Konstitusi (1924) tentang penetapan Islam sebagai agama negara, pemberian hak pilih kepada perempuan dalam pemilu kabupaten/kotamadya pada (1930) dan pemilu nasional pada (1934). Inisiasi program penghilangan kata-kata Arab dan Persia dari Bahasa Turki (1931), pengadopsian sistem metrik (1931), pelarangan adzan memakai bahasa Arab dan digantikan dengan bahasa Turki (1932), pengadopsian nama marga (1934), pengantian hari libur dari Jumat ke Minggu (1935) (Jacoby, 2004, hal. 80).

Ada empat fase sekularisasi yang di tempuh oleh Mustafa Kemal, yaitu :

- a) Sekularisasi simbolis, yakni melakukan pembaruan dalam aspek-aspek kebudayaan nasional atau kehidupan sosial yang memiliki identifikasi simbolis Islam.

- b) Sekularisasi institusional, yakni perubahan-perubahan tatanan organisasi yang dirancang untuk menghancurkan kekuatan institusional Islam.
- c) Sekularisasi fungsional, yakni melakukan perubahan-perubahan fungsi khusus institusi-institusi keagamaan dan pemerintahan.
- d) Sekularisasi legal, yakni perubahan-perubahan dalam struktur hukum masyarakat (Toprak, 1999, hal. 72).

Untuk memperkuat kebijakan-kebijakan tersebut, Mustafa Kemal melakukan tindakan represif kepada masyarakat dan lawan-lawan politiknya yang dinilai anti kemajuan. Akibatnya, ribuan orang dieksekusi dan dijebloskan kedalam penjara, termasuk didalamnya tokoh pembaharuan Islam, Muhammad Said Nursi dan Ziya Gokalp seorang penyair terkemuka Turki yang sebelumnya memuji kepahlawanan Mustafa Kemal dalam perjuangannya mengusir pasukan Inggris. Dalam kenyataannya, praktik sekularisme Mustafa Kemal malah menjadikannya sebagai kebijakan anti-Islam. Dalam sebuah peristiwa, Mustafa Kemal tidak ragu memberangus sebuah desa di wilayah religius Konya karena melanggar larangan mengumandangkan adzan dan mencopot paksa jilbab yang dikenakan seorang perempuan.

Mustafa Kemal Atatürk berkuasa sebagai Presiden Turki dari tahun 1923 sampai 1938 yang bekisar selama 15 tahun. Ini merupakan waktu yang cukup bagi Mustafa Kemal untuk merombak dan mengubah tatanan kehidupan dan kebijakan politik di Turki.

## 2. Berkembangnya Ideologi Kemalisme

Mustafa Kemal Pasha memperkenalkan Kemalisme sebagai gagasan pemikiran dan ide-ide sekuler yang diusungnya. Kemalisme dalam bahasa Turki disebut juga dengan *Ataturkculuk* atau *Ataturkcu Dusunce* yang bersimbolkan enam anak panah atau *alti ok*, enam anak panah tersebut berisikan enam prinsip yakni:

- 1) Republikanisme (*cumhuriyetcilik*), merupakan penghapusan seluruh sistem politik dan pemerintahan yang ada di zaman Turki Utsmani.
- 2) Populisme (*halkcilik*), merupakan kesamaan hak untuk menduduki semua jabatan di pemerintahan.
- 3) Nasionalisme (*milliyetcilik, ulusculuk*), prinsip ini digunakan untuk menghilangkan nilai sosial budaya Turki Utsmani. Maksudnya yakni menerapkan nilai budaya Barat di segala aspek kehidupan.
- 4) Sekularisme (*laiklik*), prinsip ini berguna untuk memisahkan peran agama dalam sistem pemerintahan, agama tidak boleh mencampuri semua urusan pemerintahan.
- 5) Reformisme (*devrimcilik*), untuk mewujudkan Turki modern maka Turki harus mengadopsi cara dan kebudayaan baru, ilmu pengetahuan, dan nilai kehidupan bangsa Eropa.
- 6) Statisme, bertujuan untuk memperbaiki kesulitan ekonomi Turki setelah perang kemerdekaan, guna menunjukkan sistem intervensi negara terhadap semua aspek kehidupan demi

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan (Mughni D. S., 1997, hal. 151).

Ideologi Kemalisme juga dipandang sebagai sebuah ekspresi formasi Mustafa Kemal dalam upayanya menciptakan negara modern dan demokratis yang dipandu dengan pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip positivisme, rasionalisme, dan pencerahan. Kemalisme yang semacam itu sering disebut sebagai “agama Turki”, atau setidaknya, Kemalisme telah merekonstruksi suatu batasan tersendiri mengenai “Islam Turki”.

Ideologi Kemalisme sejak awal dimaksudkan untuk merekonstruksi identitas baru Turki yang berlandaskan pada prinsip yang anti-Utsmaniyah dan anti-Islamisme. Menurut kelompok sekuler, sejarah Turki kuno (pra-Islam) pada prinsipnya telah memiliki akar modernisme dan demokrasi yang merefleksikan budaya asli masyarakat Turki. Namun dalam perkembangannya, nilai-nilai leluhur tersebut terhalangi oleh masuknya Islam dan eksistensi imperialisme Dinasti Utsmani. Sehingga ideologi Kemalisme diyakini sebagai upaya pembebasan terhadap rakyat Turki menuju peradaban baru dan sekaligus mengembalikan Turki kepada sumber peradaban dunia (Barat). Ideologi Kemalisme dianggap sebagai proses transformasi total dari keyakinan, pandangan, pemikiran, gaya hidup, dan institusi islamisme.

Kemalisme bertujuan untuk memutus Turki dari sejarah masa lalu, yaitu masa Kekhalifahan Turki Utsmani yang merupakan simbol peradaban Islam (1453-1924) dengan pengaruh kuat dari kebudayaan Arab dan Persia.

Selain itu, Kemalisme juga bertujuan untuk membawa Turki kepada suatu tingkat kemajuan (modernisasi) seperti yang telah diraih oleh bangsa-bangsa Barat. Menurut Mustafa Kemal modernisasi merupakan upaya *westernisasi* secara keseluruhan, sehingga menurut Mustafa Kemal sebuah bangsa dapat dikatakan modern apabila telah melakukan *westernisasi*.

Mustafa Kemal menyatakan bahwa peradaban maju adalah peradaban seperti Barat dengan segala sesuatunya. Salah seorang pengikut Mustafa Kemal bernama Agouglu menyatakan bahwa peradaban Barat dapat mengalahkan peradaban yang lainnya, bukan hanya karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Dalam hal ini tema sentral dari pandangan Mustafa Kemal tentang *Westernisasi* adalah bahwa Turki harus menjadi sekuler seperti bangsa Barat. Segala hal yang tidak seiring dengan paham ini maka harus dihilangkan atau disingkirkan dari pemerintahan ataupun sosial masyarakat Turki. Sejak awal Mustafa Kemal menolak ide-ide tentang sintesis-konvergensi antara peradaban Barat dan Timur. Turki harus mencontoh peradaban Barat secara keseluruhan.

*Westernisme*, Sekularisme, dan Nasionalisme merupakan dasar pembaharuan yang diusung oleh Mustafa Kemal. Pembaharuan pertama, diarahkan pada konstitusi negara, menurut Mustafa Kemal pemerintahan harusnya dipisahkan dari agama dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan ideologi Kemalisme inilah tatanan politik dan pemerintahan Turki mengalami perubahan yang signifikan setelah terbentuknya republik Turki pada 1923.

Modernisme yang terjadi di Turki pasca Dinasti Utsmani adalah pendirian negara nasional berbentuk republik yang meliputi penduduk pedalaman Anatolia, para pengungsi Balkan, dan etnik Kurdi di bawah prinsip-prinsip Sekularisme dan *Westernisme*. Setiap adanya upaya untuk mendesak kembali spiritualitas Islam akan dianggap sebagai ancaman eksistensial Republik Turki modern karena hendak mengembalikan Turki ke zaman kemunduran. Para individu atau kelompok yang terlibat dalam upaya ini disebut sebagai kelompok reaksioner atau *Irtica*.

Mustafa Kemal menghendaki kemutlakan *westernisasi* dan sekularisasi yang radikal secara sistematis untuk menghadirkan identitas baru bagi Turki. Maka kasus Turki sangat berbeda dengan Jepang, karena Jepang yang juga sempat mengalami revolusi tetapi sangat akomodatif terhadap nilai-nilai tradisionalnya. Turki modern tidak dibangun dengan sisa-sisa nilai Islam ataupun Utsmani, namun dibentuk oleh elit-elit Kemalis yang berhasil menang melawan penjajah asing dan rezim lama.

Menurut WJ Korap Kaprovic, doktrin politik kemalisme tidak lahir dari pemikiran yang seksama, namun lebih merupakan produk teori yang lahir karena reaksi, praktik, dan pengalaman politik Mustafa Kemal dalam melihat kondisi Turki pada saat itu. Mustafa Kemal melihat Turki sedang dikelilingi musuh yang mencoba melemahkan dan bisa saja akan mencaplok Turki. Kemunduran Turki disebabkan karena adanya kelompok reaksioner (Islam) beserta simbol politiknya yang lapuk (Turki Utsmani). Oleh karena itu, maka Turki harus memiliki militer yang kuat dan selanjutnya menyingkirkan kekuatan reaksioner yang menjadi hambatan utama modernisme Turki.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Graham Fuller dalam *The New Turkish Republic*, menurut Graham Kemalisme menjadi daya dorong dirinya dalam menjalankan politik paranoid, yakni mendorong militer memperkuat kekuatan domestik dan membenarkan upaya super-represif dalam menjaga negara dari ancaman yang dipersepsikan (Dzakirin, 2012, hal. 105-106).

Dalam level politik praktis, pemikiran Kemalisme sejak munculnya telah berturut-turut mengalami evolusi karena adanya tantangan Islamisme. Kemalisme berevolusi dari ideologi otoritarianisme menjadi sebagai filsafat hidup. Pada awalnya Kemalisme adalah ideologi otoritarianisme partai tunggal (1920-1950) dengan agenda politik *westernisme*. Namun, pasca terjadinya kudeta 1960, Kemalisme menjadi ideologi setengah resmi untuk negara (Perubahan Konstitusi 1961). Dalam Konstitusi tersebut ditegaskan bahwa semua produk hukum yang berlaku di negara Turki tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Kemalisme.

Evolusi pemikiran Kemalisme mencapai puncaknya ketika militer melakukan kudeta lagi pada tahun 1980. Dalam konstitusi baru 1982, Kemalisme menjadi ideologi resmi Republik Turki. Pada evolusi ketiga ini, ideologi Kemalisme menjadi prinsip kewarganegaraan dan filosofi hegemonik Republik Turki modern. Dengan demikian, ideologi ini bermetamorfosis dari awalnya ideologi politik kenegaraan menjadi filosofi dan gaya hidup rakyat Turki. Sekularisme seakan-akan berubah menjadi “agama wajib” bagi seluruh rakyat Turki.

### 3. Militer dan Partai CHP sebagai Alat Kekuasaan

Turki merupakan negara yang lahir melalui revolusi militer, revolusi yang dipimpin oleh Mustafa Kemal pasca kekalahan Turki Utsmani pada Perang Dunia I. Setelah peristiwa itu, prinsip penggulingan kekuasaan menjadi suatu cara untuk membangun negara republik dan melestarikannya. Revolusi juga merupakan salah satu dari enam prinsip undang-undang Turki yang diwasiatkan Mustafa Kemal pada satu tahun jelang wafatnya pada tahun 1937 kepada pasukan Turki. Mustafa Kemal menegaskan bahwa militer merupakan faktor terkuat bagi Turki modern dari pemimpin revolusinya.

Militer Turki kemudian menganggap dirinya sebagai penjaga Republik Turki dan yang dipercaya untuk menjaga enam prinsip Kemalisme yang sekaligus menjadi alat kekuasaan pemerintah. Cara penafsirannya yang khusus terhadap undang-undang menjadi sarana untuk melakukan segala penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh militer Turki. Maka dengan itu militer dapat menumbangkan pemerintah-pemerintah sipil yang terpilih ketika dinilai menyimpang dari jalan yang merusak prinsip-prinsip Republik Turki, terutama Sekularisme.

Ada beberapa alasan yang membuat militer memiliki derajat tinggi dalam politik Turki, hal yang harus diperhatikan adalah aspek sejarah bagaimana negara Republik Turki terbentuk. Ada dua kondisi sosio-politik yang melatar belakangnya. *Pertama*, adanya ancaman kolonialisme negara Barat atas warisan imperium Turki Utsmani Pasca Perang Dunia I. Ketika itu Barat membagi-bagi bekas wilayah kekuasaan Turki Utsmani di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah kepada Perancis dan Inggris dalam

perjanjian *Sykes Picot*. Semenjak itulah Turki terlebat dalam perang pembebasan melawan Inggris dan sekutunya pada 1912-1922. Saat itu gerakan Opsir Muda menyalahkan kekacauan politik kepada Imperium Utsmani. *Kedua*, adanya ketakutan balasan atas pendukung islamis pasca dibubarkannya Kekhalifahan Turki Ustmani. Mustafa Kemal beranggapan bahwa kelompok pendukung islamis adalah kaum reaksioner yang bertujuan membawa Turki ke era keterbelakangan. Itulah mengapa Mustafa Kemal menjadikan kekuatan militer sebagai alat yang menopang kekuasaannya.

Pada mulanya Mustafa Kemal sebenarnya melarang militer terlibat dalam dunia politik, bahkan diatur dalam hukum pidana militer 1632 pada Mei 1930. Pasal 148 hukum pidana tersebut melarang anggota militer menjadi anggota partai politik dan aktif dalam politik, serta menyatakan bahwa militer netral dari politik. Namun, disisi lain militer juga diposisikan sebagai garda terdepan revolusi dengan hak untuk ikut campur tangan dalam politik apabila kelangsungan hidup negara dalam bahaya. Dalam konteks yang ini militer diposisikan sebagai penjaga republik (*nigahban-i cumhuriyet*) yang sekaligus pengawas republik (*cumhuriyetin bekcisi*). Militer menjadi lembaga yang paling berhak menginterpretasikan Kemalisme. Akibatnya, selama bertahun-tahun militer secara sistematis melanggar prinsip ketidakterlibatan dalam politik.

Pada praktiknya, militer memiliki ruang otonomi yang sangat luas. Kewenangannya tidak hanya mencakup urusan domestik militer, tetapi juga memiliki wewenang untuk melakukan intervensi dalam politik dimana intervensi tersebut selalu dipahami pihak militer sebagai upaya menjaga kemurnian ideologi Kemalisme. Militer yang mengklaim sebagai penjaga

ideologi Turki modern dibantu para elite birokrasi dan dunia peradilan. Mereka ini dalam politik Turki modern dikenal sebagai kelompok *Deep State (Derin Devlet)*, yakni koalisi anti-demokrasi super rahasia namun sangat berpengaruh dalam sistem politik Turki. Koalisi ini juga melibatkan elemen tingkat tinggi dalam struktur dinas intelijen, militer, kepolisian, dan mafia yang dalam praktiknya sangat anti-Islam, anti-kiri, dan anti etnis Kurdi. Eksistensi kelompok ini juga diuntungkan karena adanya dukungan simbiotik dari Amerika Serikat dalam hal ini melalui NATO dalam Perang Dingin melawan Komunisme.

Selain militer, Mustafa Kemal juga mendirikan sebuah partai untuk menjaga kekuasaannya. Mustafa Kemal berupaya keras untuk mengontrol majelis dan menjalankan ideologinya melalui pendirian partai politik dengan nama *Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)* atau dalam bahasa Indonesia Partai Rakyat Republik pada 9 September 1923. Partai ini menjadi mesin penggerak yang efektif dalam menjalankan dan mempertahankan ideologi Sekularisme di Turki. Dapat dikatakan bahwa partai CHP adalah partai tunggal yang memerintah Turki sampai pada tahun 1945. Melalui partai CHP Sekularisme bertahan di pemerintahan, sehingga Presiden dan Perdana Menteri diduduki oleh orang sekuler.

Pada 17 Oktober 1924, para perwira yang kecewa dengan manuver politik Mustafa Kemal, membentuk Partai Rakyat Progresif atau *Terakkirperver Cumhuriyet Firkasi (TCF)*. Namun partai ini tidak bertahan lama karena dibubarkan oleh Mustafa Kemal pada 5 Juni 1925. Kemudian pada tahun 1930 Mustafa Kemal memberi peluang bagi hadirnya Partai Republik Merdeka atau *Serbest Cumhuriyet Firkasi (SCF)* yang dipimpin

Fethi Okyar. Namun partai ini tidaklah berjalan lama dan membubarkan diri pada tahun yang sama karena kecewa dengan kecurangan CHP dalam pemilu lokal. Akibatnya, sistem dwi-partai gagal diterapkan dan sistem partai tunggal pun tetap bertahan (Alfian, 2015, hal. 41).

Mustafa Kemal membangun Turki dengan konstitusi yang liberal, namun ia memandang politik kepartaian dengan penuh rasa curiga dan tidak percaya. Ia menganggap oposisi dapat membahayakan perubahan-perubahan yang dilakukannya, maka dengan sistem satu partai dan “menghalangi” adanya partai lain yang muncul dianggap akan lebih baik untuk melancarkan perubahan dan pembaharuan yang dilakukannya dalam politik Turki.

Setelah wafatnya Mustafa Kemal, Turki mengalami transisi politik dari sistem satu partai menjadi multi-partai. Secara garis besar sistem ini mengikuti pola pembagian kekuasaan menjadi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif Turki memiliki struktur ganda, yakni kepala negara dipegang oleh Presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri.

Jabatan Presiden Turki digantikan oleh Ismet Inonu sampai pada tahun 1950. Inonu merupakan pengikut setia dari Mustafa Kemal yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri dan tentu saja menjadi pelanjut ideologi Kemalisme di Turki. Inonu tampil sebagai tokoh politik paling penting di Turki. Selain sebagai Presiden, Inonu juga mendapat tempat yang sangat istimewa di partai CHP. Pada Kongres Luar Biasa CHP Ia diangkat menjadi Ketua Umum permanen partai CHP.

Pada awalnya Presiden Inonu menginginkan memperkuat sistem pseudo-demokratik dan tradisi partai hegemonil. Namun, Ia mendapatkan

tekanan politik begitu kuat dari dalam negeri. Sehingga pada Juni 1945, empat politisi CHP yakni Adnan Momnderes, Celal Bayar, Refik Koraltan dan Fuat Koprulu mengajukan Memorandum Empat (*Dortlu Takrir*) di parlemen. Memorandum tersebut berisi permintaan perubahan pada konstitusi Turki untuk menerapkan demokrasi penuh. Kemudian Inonu menerima permintaan tersebut, kemudian keluarlah kebijakan multi-partai dan disambut dengan munculnya partai-partai baru seperti; Partai Pembangunan Nasional atau Milli Kalkina Partisi (MKP), Partai Demokrat atau Demokrat Parti (DP), Partai Petani dan Pekerja Turki (*Turkiye Sosyalist Emekci ve Koylu Partisi (TSEKP)*) (Alfian, 2015, hal. 45).

Setelah berakhirnya era Presiden Inonu, proses demokrasi pun berlangsung dalam pemilihan umum di Turki. Partai Demokrat berhasil menang telak saat pemilu pasca rezim partai tunggal. Maka terpilihlah Ali Adnan Menderes sebagai Perdana Menteri Turki, sedangkan Ketua Umum Partai Demokrasi Celal Bayar sebagai Presiden Turki. Saat kampanye Partai Demokrat menjanjikan reformasi dan kebebasan beragama.

Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Adnan Menderez segera memulihkan kembali hak-hak umat Islam. Larangan ziarah dicabut, masjid dikembalikan fungsinya, dan suara azan kembali dikumandangkan dalam bahasa Arab. Langkah berani tersebut mengundang kemarahan militer, karena dianggap telah melanggar ideologi Kemalisme. Sehingga pada akhirnya pemerintahan digulingkan oleh militer dibawah Cemal Gursel.

Setelah itu, diadakan kembali pemilihan umum di Turki dan kekuasaan di pemerintahan kembali dipegang oleh CHP. Setelah kepergian Mustafa Kemal, penerus ideologi sekuler sangat aktif dalam bidang militer dan partai

politik. Sehingga dalam pemilihan umum di Turki, selalu dimenangkan oleh partai yang berideologikan sekuler yakni CHP. Ketika partai CHP bisa dikalahkan oleh partai yang lain, kelompok sekuler masih mempunyai militer sebagai kekuatan tambahan. Terbukti dengan adanya beberapa kudeta yang dilakukan oleh militer atas pemerintahan yang tidak sepeham dengan kelompok sekuler yang selalu menjaga ideologi Kemalisme.

## **B. Politik Luar Negeri Turki Pasca Revolusi**

### **1. Turki Berkiblat pada Barat**

Setelah berdirinya Republik Turki, Mustafa Kemal selaku Presiden pertama Turki tidak hanya melakukan perubahan besar-besaran terhadap kebijakan dalam negeri Turki, tetapi juga terhadap kebijakan luar negeri Turki. Tidak jauh berbeda dengan kebijakan dalam negerinya, kebijakan luar negeri yang diambil oleh Mustafa Kemal juga sangat condong terhadap Barat, *western civilization* sering kali merujuk pada Eropa bagian Barat, terutama Inggris dan Perancis.

Turki menjadikan negara Barat sebagai tempat berkiblat peradaban barunya dan bahkan dijadikan aliansi hingga saat itu. Terdapat dua orientasi yang paling utama dalam setiap kebijakan luar negeri Turki pasca revolusi. Orientasi pertama Turki yakni menjaga eksistensi Turki di dunia internasional sesuai kedaulatannya dan membangun kembali fondasi-fondasi berbangsa dan bernegara bagi rakyat Turki. Orientasi kedua Turki yakni membuat dan merealisasikan formasi kebijakan luar negeri Turki yang bertajuk *western oriented*, yaitu dengan mengalihkan lingkaran konsentrasi ke Barat.

Ketika masa Perang Dingin, kekuatan politik dunia terbelah menjadi dua yang didasarkan pada perbedaan dua ideologi dari dua negara adikuasa saat itu, yakni liberalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet. Melalui kebijakan luar negeri *west oriented* Turki pada masa tersebut lebih memilih untuk condong ke pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Hal tersebut dibuktikan dengan bergabungnya Turki ke dalam pakta pertahanan Atlantik Utara yang berisikan negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yaitu *North Atlantic Treaty Organizations* (NATO). NATO sendiri dibentuk pada 9 April 1949 di Washington DC, Amerika Serikat oleh 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxemburg, Norwegia, Perancis, dan Portugal (NATO, 2015). Turki telah mengajukan aplikasi sejak tahun 1950 dan diterima sebagai anggota resmi NATO pada tahun 1952 (Alfian, 2015, hal. 46).

Bergabungnya Turki ke NATO juga tidak lepas karena faktor ketegangannya dengan Uni Soviet kala itu terkait konflik teritorial di selat Dardanelles dan Bosphorus, yakni dua selat yang menghubungkan antara Laut Hitam dan Laut Tengah (Mediterranean) (Rozakes, 1987, hal. 43). Tujuannya dibentuk NATO adalah untuk menjaga keamanan negara-negara yang berideologi liberal dari ancaman komunisme, disisi lain Uni Soviet bersama-sama dengan negara-negara blok Timur juga membentuk pakta pertahanan Warsawa untuk mengimbangi NATO.

**Gambar 1.1 Peta Turki**



Sumber : Britannica (<https://www.britannica.com/place/Turkey>)

Posisi geografis Turki sangat strategis seperti yang bisa kita lihat dari peta diatas, karena terletak diantara sisi Barat (Eropa) dan Timur (Asia), dengan kata lain Turki memiliki lebih banyak pilihan untuk meraih kepentingan nasionalnya yakni dari Eropa dan juga Asia. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa Turki sebenarnya memiliki banyak kesempatan dalam membangun dan merealisasikan politik luar negerinya dengan negara-negara di Asia ataupun Eropa. Namun pada kenyataannya, dalam menjalin kerjasama luar negeri, ada banyak dinamika yang mempengaruhi politik luar negeri Turki didalamnya.

## **2. Negara-negara Islam bukan Prioritas Politik Luar Negeri Turki**

Meskipun wilayah Turki hampir 90% berada di daratan Asia yang lebih tepatnya berada di kawasan Timur Tengah, serta berbatasan langsung dengan negara-negara Arab yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun pada masa awal-awal Turki pasca revolusi dibawah kepemimpinan Mustafa Kemal negara-negara Arab bukan menjadi prioritas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya. Kala itu Mustafa Kemal lebih condong

ke Barat dengan *west orientednya* yang menjadikan Eropa sebagai lingkaran konsentris utama politik luar negeri Turki.

Terdapat setidaknya dua alasan yang menjadi penyebab negara-negara Islam (Arab) tidak menjadi prioritas dalam politik luar negeri Turki, yaitu *pertama*, adanya peristiwa masa lalu yang menjadi pengganjal hubungan bilateral Turki dengan negara-negara Islam di kawasan jazirah Arab, yakni ketika masa Kekhalifahan Turki Utsmani hubungan bangsa Turki dan bangsa Arab tidak harmonis terutama dimasa-masa akhir kekhilafan dan ketika bangsa Arab mulai dekat dengan bangsa Barat (Inggris dan Perancis). Bangsa Arab merasa Kekhalifahan Turki Utsmani tidak adil terhadap bangsa Arab dan mereka merasa dijajah oleh bangsa Turki, sehingga timbullah pemberontakan dari bangsa Arab. Kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia I tidak lepas dari andil bangsa Arab yang menolak berperang untuk Turki Utsmani.

*Kedua*, adanya upaya *westerniasi* yang dilakukan oleh Mustafa Kemal menyebabkan Turki menjauhkan diri dari Islam, termasuk juga negara-negara dengan mayoritas penduduk Islam. Ditambah lagi ekonomi negara-negara Arab kala itu tidak seperti era sekarang yang ditopang dengan kekuatan minyak, sehingga ekonomi mereka tidak lebih baik dari Turki. Hal tersebut yang semakin memperkuat alasan Turki untuk tidak menjadikan negara-negara Islam sebagai prioritasnya serta lebih fokus pada negara-negara Eropa dalam menjalankan politik luar negeri (Eisenstadt S. , 1984).

Sewajarnya sebuah negara dalam menjalankan politik luar negerinya tentu saja didasarkan pada kepentingan nasionalnya, terdapat prioritas serta kalkulasi untung rugi yang dilakukan secara cermat sebelum mengambil

sebuah kebijakan luar negeri. Pada masa pasca revolusi Turki, bagi Mustafa Kemal kedekatan dengan Barat merupakan jalan keluar untuk menjadikan Turki sebagai negara yang maju dan modern.

### **C. Politik Luar Negeri Turki Era Erdogan**

#### **1. Erdogan Berupaya Memutus Dominasi Barat**

Pada pemilu tahun 2002, AKP yang digawangi oleh Recep Tayyip Erdogan berhasil memenangkan pemilu dengan mengalahkan CHP. Sejak saat itu Turki mulai merubah kebijakan-kebijakan baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Dibawah AKP Turki mulai sedikit demi sedikit merubah kebijakan terhadap Barat maupun Islam, hal tersebut tercermin dalam strategi-strategi politik luar negerinya. Didukung dengan letak geografis yang strategi, Turki dibawah kepemimpinan Erdogan mulai menyusun strategi-strategi dalam politik luar negerinya, serta merealisasikan upaya untuk mencari keuntungan dari letak geografisnya.

Terdapat lima prinsip Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di era Erdogan, yakni *pertama*, mrnciptakan keseimbangan antara demokrasi dan keamanan, sehingga mempermudah Turki dalam mengembangkan negara dan wilayah disekitarnya. Diperlukannya rasa aman dan nyaman bagi penduduk suatu negara, dengan tidak mengorbankan kebebasan dan hak asasi rakyat. Sehingga pasca kemenangan AKP pada tahun 2002, Turki telah membebaskan segala hak bagi penduduknya, dan menghapuskan segala tekanan didalam negaranya.

*Kedua*, diberlukannya kebijakan, “*zero problem policy toward Turkey’s neighbors*”. Kebijakan ini sukses diimplementasi oleh Turki di era Erdogan, karena Turki berusaha untuk membangun relasi yang baik antar

negara-negara Tetangganya. Seperti hubungan Turki dengan Suriah dan Georgia. Kedua negara tersebut sama-sama bekerjasama dalam hal ekonomi dan transportasi, dan juga dalam hal-hal yang lainnya. Adanya kerjasama-kerjasama tersebut menjadikan negara tetangga Turki lainnya menjadi sangat percaya untuk bekerjasama dengan Turki.

*Ketiga*, Turki berupaya untuk aktif terus dalam mengembangkan serta menambah kerjasama dengan negara-negara disekitarnya. Contohnya seperti pada saat terjadinya konflik di Bosnia-Herzegovina, Turki aktif dalam ikut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu menjadi salah satu jembatan untuk Turki hadir di wilayah Eropa. Setelah itu Turki berusaha untuk membangun infrastruktur dalam membantu NATO, negara-negara di Eropa dan negara Barat lainnya. Akan tetapi, masih ada sedikit kesulitan bagi Turki untuk mengembangkan kerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah. Hal ini karena adanya faktor permasalahan suku Kurdi didalamnya.

*Keempat*, Turki berupaya untuk memperbaiki dan mematuhi multi-dimensi politik luar negeri yang telah dibangun. Misalnya, hubungan politik luar negeri Turki dengan Amerika Serikat, dan juga melalui NATO, proses keanggotaan Turki di Uni Eropa, pembangunan kerjasama dengan Rusia, dilakukan untuk saling melengkapi, bukan untuk berkompetisi. Hal ini dilakukan demi menjaga kestabilan kerjasama Turki dengan beberapa negara yang ada disekitarnya.

*Kelima*, direalisasikannya diplomasi berirama oleh Turki di era Erdogan dalam menjalankan politik luar negerinya. Maksud dari diplomasi berirama Turki yakni Turki berusaha aktif dalam berbagai pertemuan

internasional dan mengambil peran penting didalamnya. Contohnya seperti, dalam pertemuan NATO dan OKI, Turki di era Erdogan menjadi salah satu negara yang dianggap penting untuk turut serta dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan. Kemudian pada tahun 2007, Turki mulai mengambil peran di Afrika yakni dengan mengambil status sebagai negara pengamat di kawasan Uni Afrika. Hal ini terjadi karena Turki memiliki keterbukaan politik luar negeri dengan negara-negara di Afrika (Davutoglu, 2008).

## **2. Turki Berupaya Menjadi Pemimpin Negara-negara Islam dalam Memperjuangkan Islam di Dunia Internasional**

Pasca kemenangan AKP pada pemilu tahun 2002, di bawah kepemimpinan Turki secara perlahan menarik kedekatannya dengan Barat. Hal tersebut dibuktikan dalam beberapa kebijakan luar negerinya, Turki di era Erdogan lebih merapat kepada negara-negara Timur Tengah (Arab), terutama dengan negara-negara Islam. Salah satu contoh kebijakannya yaitu, kebijakann Turki dengan menolak manjadikan wilayahnya sebagai pangkalan militer NATO untuk melakukan invasi ke Libya. Turki juga menolak permintaan Amerika Serikat untuk menjadikan wilayahnya sebagai pangkalan militer dalam agenda invasi ke Irak.

Turki berusaha untuk menyebarkan nilai-nilai yang dianut oleh Turki yang tertuang pada prinsip dasar politik luar negeri Turki yang kelima, yaitu pelaksanaan *rhythmic diplomacy*. Turki menilai untuk menyebarkan nilai-nilai yang mereka anut agar terkenal didalam tata pergaulan internasional salah satu mekanismenya adalah dengan melakukan *rhythmic diplomacy*. Diplomasi ini merupakan diplomasi yang dilakukan oleh Turki yang intinya

Turki akan aktif dalam berbagai forum internasional guna menyebarkan nilai-nilainya dan mencapai *national interestnya* (Dzakirin, 2012).

Beberapa hal yang telah Turki lakukan dalam menjalankan diplomasi tersebut diantaranya yaitu aktif menjadi tuan rumah dari berbagai forum internasional, misalnya seperti *the NATO Summit dan the OIC Summit*, serta Turki menjadi anggota pengamat di dalam *Africa Union* semenjak keterbukaannya dengan Afrika pada tahun 2005, diundang ke dalam forum *Arab League* dua kali, serta menandatangani perjanjian dengan negara-negara Arab pada tahun 2007.

Dibawah era kepemimpinan Erdogan Turki dibawa lebih mendekatkan diri ke Timur Tengah (Arab), namun pada kenyataannya dalam perjalanannya mendapat tantangan yang sangat besar dengan terjadinya peristiwa *Arab Spring*. Peristiwa *Arab Spring* terjadi pada saat hubungan Turki dengan Amerika Serikat, Israel dan negara-negara Uni Eropa berada pada kondisi yang tidak stabil. Dalam kasus keterlibatan Turki di *Arab Spring*, ditemukan bahwa faktor pengaruh eksternal tidak mempunyai signifikansi yang berarti bila dibandingkan faktor pengaruh internal. Hal ini tampak dari tidak adanya alat kontrol dari aktor-aktor negara Barat sebagai faktor eksternal, untuk mempengaruhi secara efektif politik luar negeri Turki. Di sisi lain, dinamika politik domestik dalam negeri Turki, seperti munculnya signifikansi opini publik dan menurunnya dominasi militer, memiliki dampak secara langsung dalam pelaksanaan politik luar negeri Turki.

Keinginan Turki di era Erdogan untuk menghidupkan kembali semangat Utsmani melalui politik luar negerinya mendapat tantangan

signifikan sejak *Arab Spring*. Politik luar negeri Turki dibawah Erdogan kerap kali didefinisikan sebagai “*the neo-Ottomanism*”. Konsep dari *neo-Ottomanism* tidak hanya berisikan politik luar negeri akan tetapi juga trend Domestik dalam *the New Turkey*. *Neo-Ottomanism* sendiri mempunyai tiga pilar utama, yaitu *pertama*, keinginan untuk kembali mendekatkan masyarakat Turki dengan budaya islam, dalam pengertian versi sekularisme yang lebih moderat.

*Kedua*, terdapat karekter yang ingin dikembangkan *neo-ottomanism* di era Erdogan yakni Turki yang lebih percaya diri dalam menjalankan perannya didunia internasional. *Neo-Ottomanism* memproyeksikan Turki sebagai *superpower* regionalnya, dengan cara semakin aktif dalam mengambil peran dalam berbagai isu diregional serta memperkuat kerjasama-kerjasama dengan negara-negara tetangganya. Turki tidak perlu lagi terpaku pada Barat dalam menjalankan politik luar negerinya dan terbuka untuk segala bentuk kerjasama yang ada.

*Ketiga*, tujuan utama dari *neo-ottomanism* ialah ingin mempererat hubungannya dengan Barat sebagaimana kembali mendekatkan diri dengan dunia Islam. Keinginan Turki untuk mendapatkan keanggotaan dalam Uni Eropa masih merupakan cita-cita besar bagi Turki di era Erdogan dengan tidak menyampingkan kerjasama dengan negara-negara Islam di Timur Tengah. Selama era Erdogan hubungan Turki dengan Timur Tengah dan dunia Arab telah meningkat secara drastis yang menegaskan bahwa Timur Tengah telah menjadi *focal point* dalam politik luar negeri serta multilateral Turki (Tocci, 2012).

Pada dewasa ini para pemimpin Arab dan masyarakat Arab secara luas juga telah lebih menerima kehadiran Turki dalam regional tersebut. Pada awal tahun 2011, Turki dengan kebijakan luar negerinya memfokuskan pada pendekatan pada negara Timur Tengah mendapat tantangan besar ketika sejumlah negara Arab mengalami pergolakan politik dalam negeri yang kerap disebut *Arab Spring* yang pada akhirnya berakhir dengan pelengseran rezim pemerintahan (Onis, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri yang diambil oleh Turki di era Erdogan memiliki dua sifat yang sesuai dengan penjelasan Morgenthau mengenai *national interest*, yaitu rasional dan fleksibel. Dalam perkembangannya dari sebelum masa pemerintahan Erdogan sampai dengan masa pemerintahan Erdogan, politik luar negeri yang diambil oleh Turki bersifat rasional sesuai dengan kebutuhan dan pemimpin dari pemerintahan yang sedang berkuasa.